



# STUDI ANALISIS BIBLIOMETRIK: KERANGKA KEBIJAKAN FISKAL DALAM EKONOMI ISLAM

**Ismul Fakhri Lubis**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara  
ismulfakhri07@gmail.com

**M. Shabri Abd. Majid**

Universitas Syiah Kuala  
mshabri@unsyiah.ac.id

**Isnaini Harahap**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan  
isnaini.harahap@uinsu.ac.id

## Abstrak

Kerangka kebijakan fiskal yang sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam harus memperhatikan kebutuhan masyarakat, agar tercapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, serta distribusi dan redistribusi yang adil dan berkeadilan bagi seluruh lapisan Masyarakat. Namun saat ini, tantangannya adalah ketika pengeluaran pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menelusuri tren studi terkini mengenai kerangka kebijakan fiskal Islam saat ini dengan analisis bibliometric. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif menggunakan *systematic literature review* dengan analisis bibliometric menggunakan *software* VOSViewer dan Harzing PoP. Temuan menunjukkan bahwa kerangka kebijakan fiskal Islam beralih dari topik dasar (prinsip-prinsip Islam), ke isu-isu yang lebih spesifik dan berkembang, seperti pertumbuhan ekonomi, ICT, pengelolaan sumber daya alam, tata kelola yang baik, dan kerjasama antarnegara Islam. Meskipun perubahan fokus, topik-topik seperti pengeluaran modal, kondisi ekonomi, utang, pendapatan, keuangan Islam, dan zakat tetap menjadi fokus utama. Maka, kualitas tata Kelola dalam fiskal, pengelolaan sumber daya alam, dan teknologi informasi menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal.

**Kata kunci:** Analisis Bibliometrik, Ekonomi Islam, Kebijakan Fiskal

## A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam perekonomian (Afonso & Sousa, 2012; Gootjes & De Haan, 2022).

Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi (Nasirin dkk., 2023), inflasi, pengangguran, serta distribusi pendapatan di masyarakat. Dalam konteks ekonomi Islam dan konvensional, kebijakan fiskal memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan (Chugunov dkk., 2021; Economics dkk., 2017).

Di banyak negara, terdapat kesenjangan yang signifikan antara kelompok-kelompok pendapatan tinggi dan rendah (Chmielewski, 2019; Federico Cingano, 2014; Hill, 2021). Dalam konteks ekonomi Islam, konsep keadilan sosial dan distribusi yang merata menjadi fokus utama (Azzumi dkk., 2023), sementara dalam ekonomi konvensional, tujuan redistribusi pendapatan lebih terfokus pada menciptakan kesetaraan sosial (BOURGUIGNON, 2018). Namun, implementasi kebijakan fiskal seringkali menghadapi tantangan, seperti resistensi politik, ketidakmampuan dalam mengumpulkan dana, dan ketidakseimbangan antara kepentingan ekonomi dan sosial.

Data empiris menunjukkan bahwa di banyak negara, distribusi pendapatan masih belum merata (Roser, 2023), dengan sebagian kecil populasi mendapatkan sebagian besar pendapatan. Namun, pengeluaran pemerintah tidak disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Misalnya, dana yang seharusnya dialokasikan untuk layanan kesehatan atau pendidikan malah digunakan untuk proyek infrastruktur yang kurang mendesak. Hal ini bisa membuat kesenjangan antara yang kaya dan miskin semakin besar, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ekonomi Islam.

Dalam ekonomi Islam, prinsip zakat dan sadaqah menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang penting (Darsono dkk., 2019), namun implementasinya seringkali tidak optimal. Di sisi lain, dalam ekonomi konvensional, penerapan pajak progresif dan program bantuan sosial telah menjadi solusi yang umum untuk mencapai redistribusi pendapatan. Misalnya, di negara-negara dengan perekonomian yang berkembang, seperti Indonesia, ketimpangan pendapatan antara kaya dan miskin dapat

sangat mencolok. Kelompok masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak memiliki akses yang sama terhadap pendidikan, layanan kesehatan, dan kesempatan ekonomi dibandingkan dengan kelompok yang lebih kaya (Uphoff dkk., 2013).

Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan sosial merupakan prinsip utama yang harus diwujudkan dalam pembangunan ekonomi (Mollenkamp, 2024). Namun, dalam praktiknya, implementasi zakat dan sistem keuangan syariah masih menghadapi berbagai tantangan, sehingga distribusi pendapatan belum optimal. Meskipun demikian, kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam memegang peranan penting dalam menentukan arah pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ekonomi Islam menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai fokus utama. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal yang sesuai harus memperhatikan kebutuhan riil masyarakat agar alokasi sumber daya publik dapat memberikan dampak yang signifikan bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang terpinggirkan.

Namun, tantangan muncul ketika pengeluaran pemerintah tidak sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat. Jika anggaran pemerintah tidak difokuskan pada sektor-sektor kunci seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang merupakan kebutuhan dasar masyarakat, hal ini dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang semakin membesar antara kelompok masyarakat yang kaya dan yang miskin. Selain itu, jika pengeluaran pemerintah tidak transparan atau terjadi penyalahgunaan dana publik, hal tersebut dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan menghambat pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Oleh karena itu, penting untuk terus memantau tren studi terkini mengenai kerangka kebijakan fiskal Islam. Melalui analisis bibliometrik, dipahami dinamika dan tantangan saat ini dalam mewujudkan prinsip-prinsip ekonomi Islam secara efektif. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tren studi dan temuan terkini, pemerintah dan pembuat kebijakan



dapat mengidentifikasi area-area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dan mengembangkan strategi kebijakan yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

## **B. Kajian Teoritis**

Kebijakan fiskal adalah salah satu instrumen utama dalam ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengatur penerimaan dan pengeluaran dalam rangka mencapai tujuan-tujuan ekonomi tertentu (Chugunov dkk., 2021; Ikhsan & Virananda, 2021). Secara umum, kebijakan fiskal dapat didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang berkaitan dengan penggunaan pendapatan dan pengeluaran pemerintah untuk mempengaruhi aktivitas ekonomi suatu negara. Ini mencakup berbagai tindakan seperti penyesuaian tarif pajak, pengeluaran publik untuk infrastruktur atau program sosial, serta kebijakan subsidi.

Dalam ekonomi Islam, prinsip-prinsip ekonomi syariah memandang kebijakan fiskal sebagai instrumen yang harus dijalankan dengan mempertimbangkan nilai-nilai Islam. Prinsip utama dalam kebijakan fiskal Islam adalah memastikan keadilan sosial dan distribusi yang merata dari pendapatan dan kekayaan (Hassan & Choudhury, 2019). Penerapan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam juga harus memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah, termasuk dalam hal pengumpulan dan penggunaan dana publik.

Di sisi lain, dalam ekonomi konvensional, kebijakan fiskal cenderung lebih terfokus pada pencapaian tujuan-tujuan ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, dan pengendalian pengangguran (Makhoba & Kaseeram, 2022). Meskipun prinsip keadilan sosial juga menjadi perhatian, pendekatan kebijakan fiskal dalam ekonomi konvensional lebih beragam dan tidak selalu terikat pada prinsip-prinsip agama.

Distribusi pendapatan merujuk pada pembagian pendapatan di antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Distribusi yang adil dan

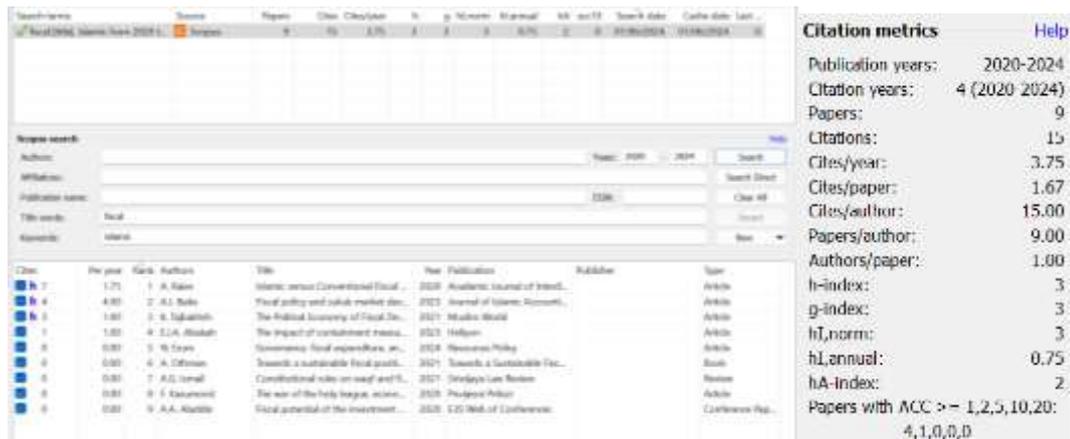
merata menjadi tujuan utama baik dalam ekonomi Islam maupun konvensional. Redistribusi pendapatan, di sisi lain, mengacu pada proses mengalihkan kembali pendapatan dari kelompok yang lebih kaya ke kelompok yang lebih miskin atau kurang mampu, dengan tujuan mencapai kesetaraan atau keadilan sosial.

Perbedaan utama antara distribusi dan redistribusi pendapatan adalah pada fokusnya. Distribusi pendapatan berkaitan dengan pembagian awal pendapatan di masyarakat, sementara redistribusi pendapatan berkaitan dengan upaya mengalihkan kembali pendapatan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti mengurangi ketimpangan sosial atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks ekonomi Islam, redistribusi pendapatan seringkali dilakukan melalui mekanisme zakat dan sadaqah, sementara dalam ekonomi konvensional, dapat dilakukan melalui pajak progresif, subsidi, atau program bantuan sosial lainnya.

### **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai publikasi yang meliputi jurnal, konferensi, dan bagian buku dalam rentang waktu 2020 hingga 2024, semuanya terkait dengan *Islamic Fiscal Policy*. Pengumpulan data dibantu oleh *software* Publish or Perish (PoP), menggunakan *title words* “fiscal” dengan *keywords* “Islamic,” yang terindeks di Scopus. Hasil pencarian ini menghasilkan sebuah kumpulan data yang terdiri dari 9 papers yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2024. Berikut rincian pencariannya:





**Figure 1 PoP Islamic Fiscal Policy**

Sumber: Publish or Perish (2024)

Berdasarkan metrik sitasi dengan kata kunci murabahah dari tahun 2020 hingga 2024, ditemukan bahwa 9 artikel telah disitasi sebanyak 15 kali, dengan rata-rata 3,75 sitasi per tahun. Nilai h-index dan g-index masing-masing adalah 3. Setelah memverifikasi kelengkapan dan relevansi kata kunci artikel, 9 artikel tersebut dipilih untuk analisis data lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan perangkat lunak VOSViewer, yang dikenal karena kemampuannya membangun dan memvisualisasikan jaringan bibliometrik, untuk menganalisis tren publikasi terkait kebijakan fiskal Islam (Van Eck & Waltman, 2017).

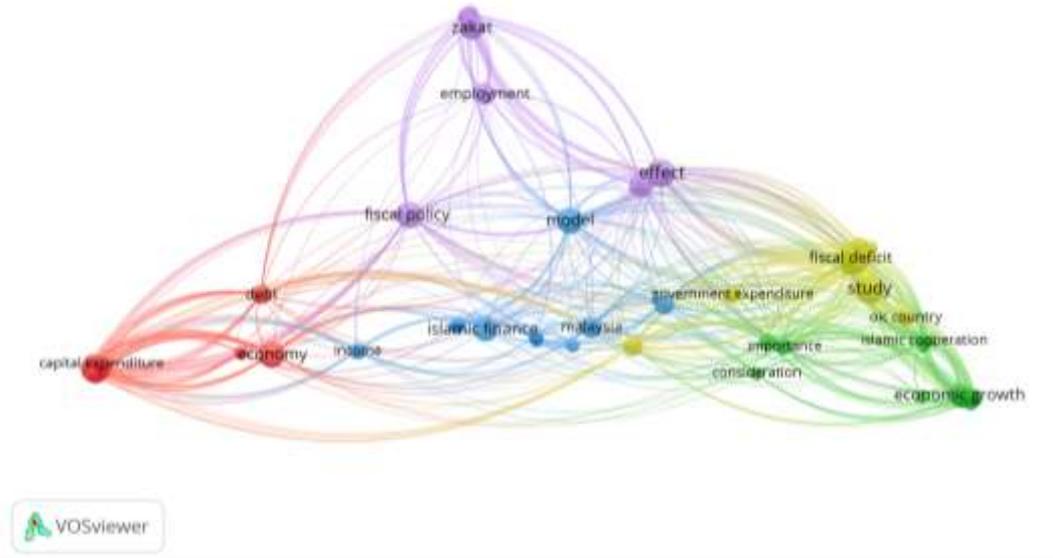
## D. Hasil dan Pembahasan

### 1. Analisis Bibliometrik

Penelitian ini memanfaatkan *software* VOSviewer untuk melakukan analisis bibliometrik dengan *title words* “fiscal” dan *keywords* “Islamic,” yang terindeks di Scopus. Hasil analisis menghasilkan tiga jenis visualisasi jaringan, yaitu *network visualization*, *overlay visualization*, dan *density visualization*. Visualisasi jaringan ini menggambarkan hubungan antara kata kunci menggunakan lingkaran berwarna dengan berbagai ukuran. Warna menunjukkan kluster kata kunci, sementara ukuran lingkaran mencerminkan frekuensi kemunculan kata kunci tersebut. Teks dan lingkaran yang lebih besar menandakan frekuensi kemunculan kata kunci

yang lebih tinggi.

Berdasarkan analisis 9 publikasi, ditemukan empat kluster kata kunci yang direpresentasikan oleh lingkaran-lingkaran dengan warna yang berbeda: merah, hijau, biru, kuning, dan ungu. Setiap kluster menunjukkan distribusi kata kunci penelitian yang berbeda.



**Figure 1 Network Visualization**

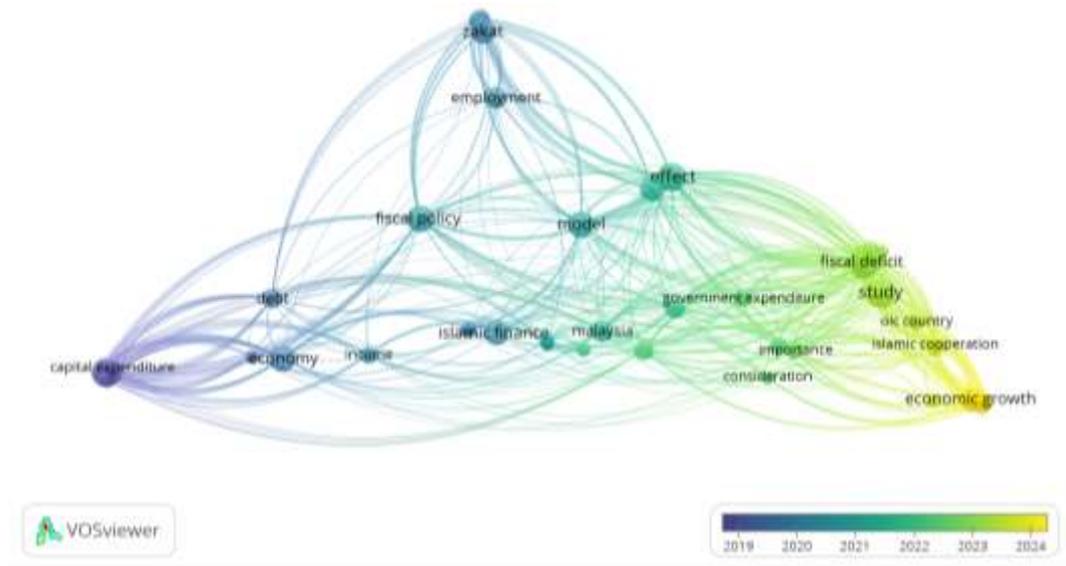
Sumber: VOSViewer (2024)

Hasil Network Visualization pada penelitian kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menunjukkan bahwa dengan menggunakan kata "fiscal" pada judul dan kata kunci "Islamic," terdapat 68 item kata kunci yang muncul. Kata kunci dengan nilai kemunculan tertinggi adalah "effect," "economy," dan "fiscal policy," masing-masing muncul 7 kali. Kata kunci dengan frekuensi kemunculan 6 kali termasuk "economic growth," "zakat," "Islamic Finance," dan "country." Kemudian, kata kunci yang muncul 5 kali adalah "debt," "fiscal deficit," "public debt," "sovereign sukuk market," "development," dan "role." Sisanya adalah kata kunci dengan frekuensi kemunculan 4 kali, 3 kali, dan 2 kali.

Hal ini menandakan bahwa topik-topik utama dalam diskusi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam sangat terfokus pada pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan keuangan Islam. Isu-isu seperti zakat, utang publik, defisit fiskal, pasar sukuk negara,

dan peran kebijakan dalam pembangunan ekonomi sering dibahas, menunjukkan pentingnya topik-topik ini dalam literatur. Analisis ini mengungkapkan bahwa para peneliti cenderung menyoroti bagaimana kebijakan fiskal Islam mempengaruhi berbagai aspek ekonomi dan pembangunan, serta peran negara dalam mengimplementasikan kebijakan ini secara efektif. Ini memberikan gambaran yang jelas tentang area-area yang membutuhkan perhatian lebih lanjut dan pengembangan dalam studi kebijakan fiskal Islam.

Kemudian, hasil *Overlay Visualization* menampilkan distribusi kata kunci melalui lingkaran berwarna, dengan setiap warna mewakili periode publikasi artikel. Variasi warna menunjukkan garis waktu artikel. Lingkaran dengan warna lebih gelap menunjukkan bahwa kata kunci tersebut lebih sering muncul dalam publikasi sebelum tahun 2020, sedangkan lingkaran berwarna kuning terang menunjukkan bahwa kata kunci tersebut menjadi lebih menonjol dalam artikel yang diterbitkan pada tahun 2024. Klasifikasi lingkaran berdasarkan warna ini memberikan pemahaman visual tentang perkembangan penggunaan dan fokus kata kunci dari waktu ke waktu dalam kaitannya dengan berbagai periode publikasi.



**Figure 2 Overlay Visualization**

Sumber: VOSViewer (2024)

Berdasarkan hasil Visualisasi Overlay, kata kunci yang muncul dalam publikasi awal yang terindeks di Scopus direpresentasikan oleh

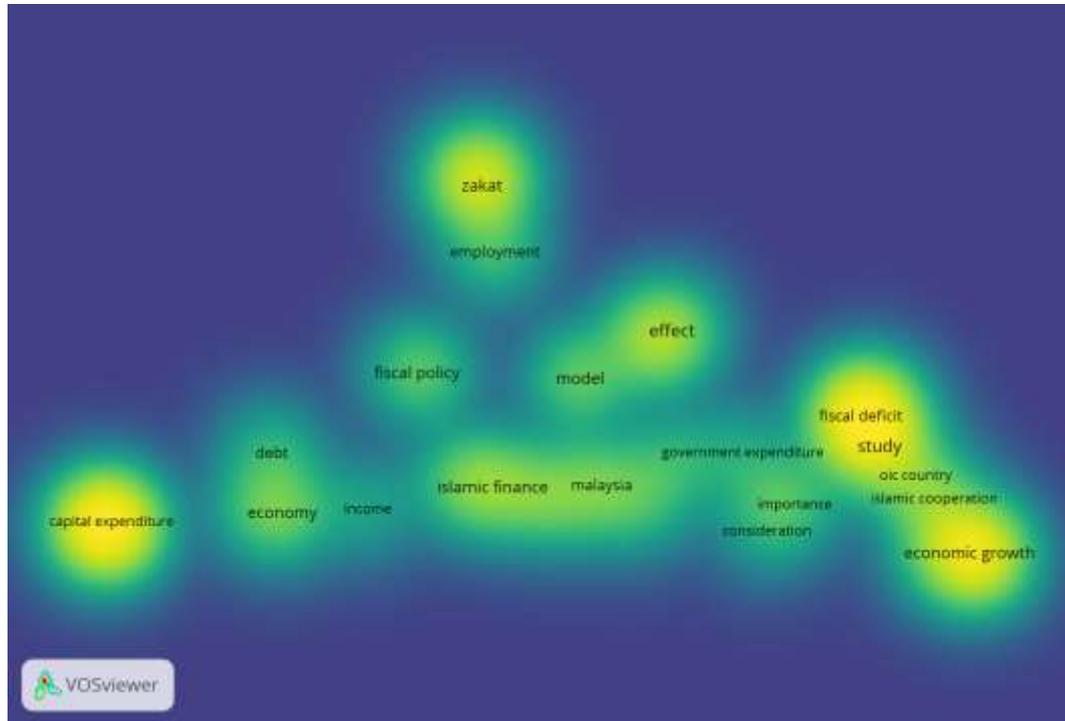
lingkaran berwarna abu-abu gelap. Kata kunci-kata kunci tersebut meliputi capital expenditure, fiscal policy, economy, sukuk, dan debt. Ini menandakan bahwa pada periode awal, penelitian cenderung fokus pada topik-topik dasar seperti pengeluaran modal, kebijakan fiskal, kondisi ekonomi umum, instrumen keuangan syariah seperti sukuk, dan masalah utang.

Namun, seiring waktu, fokus penelitian beralih ke topik-topik yang lebih spesifik dan berkembang. Lingkaran berwarna kuning terang menunjukkan bahwa publikasi yang lebih baru, seperti yang dirilis pada tahun 2024, menyoroti kata kunci seperti economic growth, information communication technology (ICT), fiscal expenditure, natural resource, governance, dan Islamic Cooperation. Ini mengindikasikan bahwa perhatian para peneliti telah bergeser ke isu-isu yang lebih kontemporer dan relevan dengan tantangan modern. Misalnya, penggunaan ICT dalam keuangan Islam dan pengeluaran fiskal yang efisien menjadi semakin penting seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan untuk meningkatkan transparansi serta efisiensi pemerintahan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam dan tata kelola yang baik menjadi fokus utama dalam upaya memastikan keberlanjutan dan keadilan dalam kebijakan fiskal Islam. Kerjasama antarnegara Islam juga mulai mendapat perhatian lebih, mencerminkan upaya untuk memperkuat solidaritas dan sinergi dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Perkembangan ini menunjukkan bahwa penelitian kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada dasar-dasar teori ekonomi, tetapi juga menyesuaikan diri dengan isu-isu praktis dan strategis yang relevan dengan dinamika ekonomi global saat ini.

Pada hasil *Density Visualization* menampilkan kepadatan kemunculan kata kunci dalam suatu jaringan. Dalam visualisasi ini, area dengan konsentrasi tinggi kata kunci akan ditampilkan dengan warna yang lebih terang dan intens, sementara area dengan kepadatan rendah akan ditampilkan dengan warna yang lebih gelap. Tujuan dari *Density Visualization* adalah untuk membantu mengidentifikasi topik yang paling



sering muncul dan paling berpengaruh dalam bidang penelitian tertentu. Dengan melihat peta kepadatan ini, kita dapat dengan cepat memahami fokus utama dan tren dalam literatur yang dianalisis.



**Figure 3 Density Visualization**

Sumber: VOSViewer (2024)

Hasil *Density Visualization* menampilkan distribusi kata kunci yang paling sering digunakan, termasuk yang menghubungkan dengan kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, dengan item capital expenditure, economy, debt, income, fiscal policy, Islamic finance, zakat, employment, model, Malaysia, effect, government expenditure, importance, study, OIC country, Islamic cooperation, dan economic growth. Ini menunjukkan bahwa penelitian dalam bidang kebijakan fiskal Islam secara konsisten menyoroti isu-isu sentral seperti pengeluaran modal, kondisi ekonomi, utang, pendapatan, dan kebijakan fiskal itu sendiri. Fokus pada keuangan Islam, zakat, dan dampaknya terhadap lapangan kerja juga mencerminkan pentingnya instrumen keuangan syariah dan kebijakan sosial dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Penggunaan kata kunci seperti Malaysia dan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC) menunjukkan adanya perhatian khusus pada negara-negara dengan

populasi Muslim yang besar, di mana kebijakan fiskal Islam diterapkan dan dipelajari secara intensif.

Selain itu, kata kunci seperti ICT dan governance dalam visualisasi sebelumnya menunjukkan bahwa penelitian terbaru juga mulai mengeksplorasi dampak teknologi informasi dan tata kelola terhadap efektivitas kebijakan fiskal Islam. Dengan demikian, Density Visualization membantu mengidentifikasi area-area penelitian yang paling berpengaruh dan berkembang, serta bagaimana isu-isu ini terhubung dan berkontribusi pada pengembangan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik, terdapat 5 kluster dalam kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam. Tabel berikut menunjukkan kluster kata kunci *Islamic Fiscal Policy*.

<i>Cluster</i>	<i>Keyword</i>
Merah 16 Items	<i>Capital expenditure, current spending, debt, deficit financing, economy, fund, government service, government spending, infrastructure, Islamic perspective, longer term, productive capacity, public good, recession, sukuk, zakah</i>
Hijau 16 Items	<i>Consideration, economic growth, fiscal expenditure, governance, governance quality, ict, impact, impotence, information communication technology, Islamic cooperation, natural resources, oic, oic country, organizations, research, sample</i>
Biru 12 Items	<i>Application, concept, development, economic development, fiscal potential, income, Islamic finance, Malaysia, model, pandemic, risk, Russia</i>
Kuning 11 Items	<i>Country, education, effect, employment, fiscal policy, individual, needy, paper, society, unemployment, zakat</i>
Ungu 10 Items	<i>Fiscal deficit, fiscal policy variable, government expenditure, oic member country, public debt, role, sovereign sukuk market, sovereign sukuk market development, study, sukuk market development</i>

Berdasarkan hasil analisis bibliometrik, 5 kluster yang membentuk kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah:

1. Kluster Merah, dengan 16 item kata kunci, mencakup topik-topik seperti pengeluaran modal, belanja publik, utang, pendanaan defisit, ekonomi,



dana, layanan pemerintah, infrastruktur, perspektif Islam, kapasitas produktif, barang publik, resesi, dan instrumen keuangan syariah seperti sukuk dan zakat. Klaster ini menyoroti aspek-aspek penting dalam kebijakan fiskal Islam terkait dengan pengelolaan anggaran dan infrastruktur ekonomi.

2. Klaster Hijau, yang terdiri dari 16 item kata kunci, memfokuskan pada pertimbangan, pertumbuhan ekonomi, pengeluaran fiskal, tata kelola, kualitas tata kelola, teknologi informasi dan komunikasi, dampak, pentingnya, kerjasama Islam, sumber daya alam, negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OIC), dan penelitian. Klaster ini menunjukkan pentingnya aspek-aspek seperti tata kelola yang baik, teknologi informasi, dan kerjasama lintas negara dalam konteks kebijakan fiskal Islam.
3. Klaster Biru, dengan 12 item kata kunci, mengeksplorasi aplikasi konsep dan pengembangan ekonomi, potensi fiskal, pendapatan, keuangan Islam, Malaysia, model-model ekonomi, dan dampak pandemi. Klaster ini menggambarkan upaya dalam mengembangkan model-model ekonomi Islam yang relevan dengan kondisi global dan lokal, serta menghadapi tantangan seperti pandemi.
4. Klaster Kuning, yang terdiri dari 11 item kata kunci, melibatkan negara-negara anggota OIC, pendidikan, dampak kebijakan fiskal, ketenagakerjaan, kebijakan fiskal, individu, masyarakat, dan zakat. Klaster ini menyoroti pentingnya pendidikan, dampak sosial kebijakan fiskal, dan upaya untuk memperhatikan kelompok rentan dalam masyarakat.
5. Klaster Ungu, dengan 10 item kata kunci, membahas defisit fiskal, variabel kebijakan fiskal, belanja pemerintah, pasar sukuk, dan pengembangan pasar sukuk. Klaster ini menyoroti tantangan dan potensi dalam pengelolaan anggaran publik dan penggunaan instrumen keuangan Islam seperti sukuk dalam mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan.

Melalui klaster-klasternya, analisis ini memberikan pemahaman



yang lebih mendalam tentang berbagai aspek kebijakan fiskal dalam konteks ekonomi Islam, serta menyoroti tren dan fokus penelitian yang sedang berkembang dalam literatur akademis.

## 2. Literature Synthesis

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam jadi perhatian penting dalam penelitian akademis. Melalui analisis bibliometric, diperoleh tren baru dalam kebijakan fiskal Islam. Ini mencakup bagaimana kebijakan ini berkaitan dengan pengelolaan uang, infrastruktur ekonomi, tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi, dan juga tantangan serta peluang dalam membuat model ekonomi yang sesuai (Abakah dkk., 2023; Aladdin dkk., 2020; Baita dkk., 2023; Erum dkk., 2024; Habib Ahmed, 2019; Kasumović, 2020; Othman, 2021; Raies, 2020; Tajbakhsh, 2021). Pentingnya pemahaman ini terletak pada dampak kebijakan fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Muslim, dengan merancang langkah-langkah yang lebih baik untuk mencapai tujuan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif.

Kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menggambarkan sebuah sistem di mana penggalan sumber-sumber dana negara didasarkan pada prinsip syariah (Hassan & Choudhury, 2019; Kasanah & Ryandono, 2022). Konsep ini tidak hanya menekankan pada pola anggaran pendapatan negara yang mirip dengan ekonomi konvensional, tetapi juga mengatur pengaturan pendapatan publik berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Rasulullah merupakan tokoh pertama yang memperkenalkan konsep baru ini pada abad ketujuh, di mana seluruh hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan Negara (Karim, 2015).

Harta yang terkumpul dianggap sebagai milik negara dan dikelola melalui lembaga atau pihak yang disebut Baitul Mal. Baitul Mal bertanggung jawab atas pengelolaan segala harta umat, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran negara. Dalam pandangan hukum syariah, semua harta, mulai dari tanah, bangunan, barang tambang, uang, komoditas



perdagangan, hingga harta benda lainnya, yang tidak memiliki pemilik yang ditentukan secara individu, dianggap sebagai hak Baitul Mal. Maka, segala sumber daya dan pendapatan yang dimiliki oleh umat Islam dikelola melalui lembaga ini untuk kepentingan umum dan kesejahteraan masyarakat, yang mengedepankan keadilan dan kesejahteraan sosial. Islam sebagai agama yang paripurna tidak hanya memperhatikan masalah ibadah dan muamalah, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain termasuk masalah Negara dan pemerintahannya. Seperti, studi (Kasumović, 2020) menyoroti pada perubahan kebijakan fiskal yang diadopsi oleh pemerintah Utsmaniyah sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang memburuk. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal dianggap sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah untuk mengatasi krisis dan mengembalikan stabilitas ekonomi negara dalam pemerintahan Islam. Ini karena Baitul Mal memainkan peran vital dalam mengelola dan mendistribusikan kekayaan umat secara adil dan efisien. Melalui mekanisme yang telah ditetapkan, Baitul Mal dapat mengalokasikan dana untuk program-program yang mendukung kesejahteraan umat dan pembangunan masyarakat. Pendekatan ini memastikan bahwa harta umat tidak hanya dikelola dengan baik tetapi juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dalam sistem pemerintahan Islam.

Sistem pemerintahan Islam memiliki peran aktif dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan kolektif masyarakat, baik secara material maupun spiritual. Distribusi pendapatan diarahkan pada kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, dengan memberikan perhatian khusus pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa keadilan sosial merupakan kewajiban moral penguasa dalam Islam.

Sumber-sumber pendapatan pemerintahan Islam didasarkan pada prinsip syariah, dengan zakat sebagai salah satu sumber pendapatan utama yang memiliki potensi besar karena hukumnya yang wajib. Studi (Raies, 2020) menyoroti peran Zakat dalam Islam sebagai salah satu pilar



utama dalam pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu. Zakat bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dengan memberikan bantuan kepada kaum miskin dan yang membutuhkan serta mencapai keadilan sosial ekonomi dengan menyamakan kesenjangan antara kaum kaya dan miskin dalam masyarakat. Penelitian ini lebih fokus pada efek Zakat terhadap lapangan pekerjaan, yaitu dampak subsidi pendidikan bagi individu yang memenuhi kriteria penerima Zakat, dengan mengenakan pajak pada pekerja kaya yang memiliki kelebihan harta (Nisab), terhadap lapangan pekerjaan. Dibandingkan dengan kebijakan fiskal konvensional yang umum digunakan oleh sebagian besar negara, penelitian ini mengevaluasi efektivitas kedua sistem fiskal dalam mengurangi pengangguran. Melalui pengembangan model teoritis neoklasik, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal Islam dapat mengurangi pengangguran, sementara kebijakan fiskal konvensional tidak memiliki dampak signifikan terhadap lapangan pekerjaan.

Selain zakat, sumber pendapatan lainnya seperti wakaf, nawa'ib, jizyah, kharaj, ushur, khums, dan amwal fadla juga menjadi bagian dari keuangan publik Islam. Pengeluaran pemerintah dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pertahanan, pelayanan sosial, pendidikan, dan infrastruktur, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kesejahteraan umum (Hassan & Choudhury, 2019). Sistem pengumpulan dana negara dalam ekonomi Islam juga menekankan pentingnya penghindaran dari praktik riba (bunga) dalam pinjaman dan utang (Siddique, 2020). Pinjaman pemerintah dalam ekonomi Islam tidak dikenakan bunga, dan harus segera dilunasi dalam waktu yang singkat. Praktik ini bertujuan untuk menghindari penimbunan kekayaan oleh sekelompok kecil orang dan memastikan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat.

Dalam kebijakan fiskal Islam, pengeluaran pemerintah didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan dan kesejahteraan umum. Dana yang diperoleh dari berbagai sumber pendapatan seperti zakat, wakaf, dan amwal fadla, dialokasikan untuk memenuhi berbagai kebutuhan



masyarakat, termasuk pertahanan, pelayanan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Pentingnya menghindari praktik riba (bunga) dalam pinjaman dan utang menjadi fokus utama, dengan pinjaman pemerintah tidak dikenakan bunga dan harus dilunasi dalam waktu singkat. Dalam studi (Aladdin dkk., 2020) menyoroti potensi fiskal tidak sepenuhnya mengizinkan untuk merangsang penggunaan model kontrak investasi seperti kemitraan, akuisisi, sewa, operasi kredit, dan instrumen keuangan seperti sukuk, karena keterbatasan dana dalam keuangan publik. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah dalam kerangka kebijakan fiskal Islam tetap berupaya untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan sektor-sektor kunci seperti pertahanan, layanan sosial, pendidikan, dan infrastruktur. Upaya untuk menghindari praktik riba dalam pinjaman dan utang tetap menjadi pijakan utama dalam pengeluaran pemerintah, menegaskan komitmen pada prinsip-prinsip keadilan dan keberlanjutan ekonomi dalam kerangka kebijakan fiskal Islam. Dalam konteks ini, (Aladdin dkk., 2020) menggarisbawahi perlunya pengembangan lebih lanjut dalam hal sistem pajak dan pembayaran non-pajak (quasi-fiskal) dari sektor korporasi dalam perekonomian negara, sesuai prinsip-prinsip Keuangan Islam.

Tujuan dari prinsip-prinsip ini adalah untuk mencegah penimbunan kekayaan oleh kelompok kecil dan memastikan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat, sehingga pengeluaran dalam kebijakan fiskal Islam tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga moral dan keadilan sosial yang mendasari ajaran Islam. Studi (Habib Ahmed, 2019) menunjukkan bahwa menggunakan pendanaan defisit dengan meningkatkan pinjaman pada tingkat bunga rendah memiliki potensi untuk meningkatkan hutang pada tingkat yang tidak berkelanjutan dan dapat menciptakan masalah ekonomi lebih lanjut dalam jangka panjang. Maka, untuk memahami perspektif Islam tentang pendanaan defisit, dua fitur pengeluaran pemerintah perlu diakui. Pengeluaran pemerintah dapat dibedakan sebagai pengeluaran saat ini dan modal. Tujuan kebijakan fiskal dan pengeluaran pemerintah dapat dilihat sebagai redistribusi pendapatan,



pengeluaran untuk menyediakan layanan pemerintah, penyediaan barang publik yang pasar gagal menyediakannya, dan penyediaan infrastruktur yang meningkatkan kapasitas produktif dalam ekonomi. Sementara pengeluaran saat ini sebaiknya di covered oleh zakat dan pajak, pengeluaran modal pada infrastruktur dapat didanai dengan menerbitkan sukuk. Selama resesi, pemerintah dapat menggunakan pengeluaran kontra-siklik dari zakat dan pendapatan pajak untuk meningkatkan pengeluaran saat ini dan menerbitkan sukuk untuk mengumpulkan dana untuk investasi untuk memperbesar pengeluaran modal dalam proyek infrastruktur. Pendekatan ini untuk mengeluarkan ekonomi dari resesi menempatkan batasan pada hutang berlebih dengan mengaitkan dana yang dikumpulkan dengan ekonomi nyata dan membantu meningkatkan kapasitas produktif dalam jangka panjang dengan mengisi kesenjangan infrastruktur.

Sementara itu, studi (Erum dkk., 2024) menunjukkan bahwa dalam jangka panjang, pengeluaran fiskal berfungsi sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, kualitas tata kelola muncul sebagai pendorong signifikan dari pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Studi ini juga menekankan pentingnya sumber daya alam dan teknologi komunikasi informasi (ICT) sebagai variabel yang signifikan yang membentuk hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran fiskal di negara-negara anggota OIC. Sedangkan, Studi (Baita dkk., 2023) menunjukkan bahwa Hutang publik adalah variabel fiskal yang signifikan yang mempromosikan perkembangan pasar sukuk, sementara defisit fiskal memiliki efek negatif terhadap perkembangan pasar sukuk. Namun, temuan menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah tidak mempengaruhi penerbitan sukuk di negara-negara anggota OIC. Studi (Abakah dkk., 2023) menganalisis dampak tindakan pengendalian dan tanggapan fiskal sangat persisten, memiliki dampak yang cukup terbatas.

### **3. Analisis Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam**

Hasil analisis menyoroti fokus utama dalam diskusi tentang



kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, yang terkonsentrasi pada tiga aspek utama: pengaruh kebijakan fiskal terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan keuangan Islam. Isu-isu sentral yang sering dibahas mencakup zakat, utang publik, defisit fiskal, pasar sukuk negara, dan peran kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Seiring berjalannya waktu, terjadi pergeseran fokus penelitian dari topik-topik dasar seperti pengeluaran modal dan instrumen keuangan syariah menuju isu-isu yang lebih spesifik dan berkembang, termasuk pertumbuhan ekonomi, teknologi informasi dan komunikasi (ICT), pengelolaan sumber daya alam, tata kelola yang baik, dan kerjasama antarnegara Islam. Meskipun terjadi perubahan fokus, topik-topik sentral seperti pengeluaran modal, kondisi ekonomi, utang, pendapatan, keuangan Islam, dan zakat tetap menjadi fokus utama penelitian. Terakhir, analisis bibliometrik mengidentifikasi lima kluster kata kunci yang mencakup berbagai aspek, mulai dari infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi hingga pendidikan, tata kelola, dan kerjasama antarnegara Islam, menunjukkan keragaman dalam penelitian terkait kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam.

Kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, menyoroti bagaimana kebijakan ini berkaitan dengan pengelolaan dana, infrastruktur ekonomi, tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi, serta tantangan dan peluang dalam pembentukan model ekonomi yang sesuai. Konsep kerangka kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam menegaskan pengelolaan dana negara berdasarkan prinsip syariah, dengan dana publik dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menempatkan pentingnya menghindari praktik riba (bunga) dalam pinjaman dan utang sebagai fokus utama, sambil memastikan dana pemerintah dikelola dengan efisien dan adil. Beberapa studi (Abakah dkk., 2023; Aladdin dkk., 2020; Baita dkk., 2023; Erum dkk., 2024; Habib Ahmed, 2019; Kasumović, 2020; Othman, 2021; Raies, 2020; Tajbakhsh, 2021) menunjukkan bahwa dalam kebijakan fiskal Islam, pengeluaran pemerintah difokuskan pada sektor-sektor kunci seperti pertahanan, layanan sosial, pendidikan, dan infrastruktur, dengan upaya utama untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Namun,



keterbatasan dana dalam keuangan publik dapat menjadi hambatan bagi penggunaan model investasi tertentu, seperti kemitraan dan akuisisi.

Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah tetap berupaya memprioritaskan keadilan dan keberlanjutan ekonomi. Perlunya pengembangan sistem pajak dan pembayaran non-pajak dari sektor korporasi dalam ekonomi negara menjadi sorotan, dengan tujuan memastikan distribusi yang adil bagi seluruh masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip Keuangan Islam yang menekankan pentingnya memastikan bahwa pengeluaran pemerintah tidak hanya memperhatikan aspek material tetapi juga moral dan keadilan sosial yang mendasari ajaran Islam. Studi juga menyoroti perlunya pengendalian defisit fiskal dan pengelolaan yang bijak terhadap hutang publik, dengan memanfaatkan pendanaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seperti zakat dan penerbitan sukuk. Dalam jangka panjang, pengeluaran fiskal dinilai sebagai penghambat pertumbuhan ekonomi, sementara kualitas tata kelola dan pengelolaan sumber daya alam serta teknologi informasi menjadi faktor penting dalam mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Temuan-temuan ini menunjukkan pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

#### **E. Penutup**

Temuan menunjukkan bahwa fokus utama diskusi tentang kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam, termasuk pengaruhnya terhadap ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan keuangan Islam. Isu-isu sentral seperti zakat, utang publik, defisit fiskal, pasar sukuk negara, dan peran kebijakan dalam pembangunan ekonomi mendapat perhatian utama. Kerangka kebijakan Islam juga beralih dari topik dasar ke isu-isu yang lebih spesifik dan berkembang, seperti pertumbuhan ekonomi, ICT, pengelolaan sumber daya alam, tata kelola yang baik, dan kerjasama antarnegara Islam. Meskipun perubahan fokus, topik-topik seperti pengeluaran modal, kondisi ekonomi, utang, pendapatan, keuangan Islam, dan zakat tetap menjadi



fokus utama. Adanya pengelolaan dana berdasarkan prinsip syariah, seharusnya fokus pada sektor-sektor kunci seperti pertahanan, layanan sosial, pendidikan, dan infrastruktur, serta pengembangan sistem pajak dan pembayaran non-pajak untuk distribusi yang adil. Kontrol defisit fiskal dan pengelolaan hutang publik yang bijak juga penting, dengan memanfaatkan pendanaan sesuai prinsip-prinsip Islam seperti zakat dan sukuk. Kualitas tata kelola, pengelolaan sumber daya alam, dan teknologi informasi menjadi kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan fiskal.

## REFERENCES

- Abakah, E. J. A., Caporale, G. M., & Gil-Alana, L. A. (2023). The impact of containment measures and monetary and fiscal responses on US financial markets during the COVID-19 pandemic. *Heliyon*, 9(5). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e15422>
- Aladdin, A. A., Gordienko, M., Nekrasova, V., & Javid, A. F. (2020). Fiscal potential of the investment mechanism of Islamic Finance. *E3S Web of Conferences*, 220, 01012. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202022001012>
- Azzumi, A. R., Miswanto, M., & Naqiyah, N. (2023). Islamic Economic Thoughts And Their Relevance In Society 5.0 Era Of Zainal Abidin Ahmad. *Public Service and Governance Journal*, 4(2), Article 2. <https://doi.org/10.56444/psgj.v4i2.913>
- Baita, A. J., Malami, H. U., & Al-Faryan, M. A. S. (2023). Fiscal policy and sukuk market development in OIC countries. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 14(8), 1216–1231. <https://doi.org/10.1108/JIABR-06-2022-0159>
- BOURGUIGNON, F. (2018). *Redistribution of Income and Reducing Economic Inequality—IMF F&D Magazine*. IMF. <https://www.imf.org/en/Publications/fandd/issues/2018/03/bourguignon>
- Chmielewski, A. K. (2019). The Global Increase in the Socioeconomic Achievement Gap, 1964 to 2015. *American Sociological Review*, 84(3), 517–544. <https://doi.org/10.1177/0003122419847165>
- Chugunov, I., Pasichnyi, M., Koroviy, V., Kaneva, T., & Nikitishin, A. (2021). Fiscal and Monetary Policy of Economic Development. *European Journal of Sustainable Development*, 10(1), 42. <https://doi.org/10.14207/ejsd.2021.v10n1p42>
- Darsono, S. N. A. C., Raihana, M., Jati, H. F., & Pachmi, A. (2019). The Impact of Productive Zakat on the Income Inequality of Mustahiq in Yogyakarta. *Journal of Economics Research and Social Sciences*, 3(1). <https://doi.org/10.18196/jerss.030107>



- Economics, I. C., Resources, N., & Development, S. (2017). Introductory Chapter: Economics, Natural Resources and Sustainable Development. Dalam M. J. Ibrahim (Ed.), *Emerging Issues in Economics and Development*. InTech. <https://doi.org/10.5772/intechopen.70399>
- Erum, N., Sohag, K., Said, J., Musa, K., & Asghar, M. M. (2024). Governance, fiscal expenditure, and economic growth in OIC countries: Role of natural resources and information communication technology. *Resources Policy*, 90, 104717. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2024.104717>
- Federico Cingano. (2014). *Trends in Income Inequality and its Impact on Economic Growth* (OECD Social, Employment and Migration Working Papers 163; OECD Social, Employment and Migration Working Papers, Vol. 163). <https://doi.org/10.1787/5jxrjncwv6j-en>
- Gootjes, B., & De Haan, J. (2022). Procyclicality of fiscal policy in European Union countries. *Journal of International Money and Finance*, 120, 102276. <https://doi.org/10.1016/j.jimonfin.2020.102276>
- Habib Ahmed, H. A. (2019). Fiscal Policy and Deficit Financing: Islamic Perspectives. *Journal of King Abdulaziz University Islamic Economics*, 32(1), 79–85. <https://doi.org/10.4197/Islec.32-1.5>
- Hassan, A., & Choudhury, M. A. (2019). Fiscal Policy in Islamic Economy. *Islamic Economics*, Query date: 2023-01-05 11:46:20, 239–253. <https://doi.org/10.4324/9780429432088-11>
- Hill, H. (2021). What's Happened to Poverty and Inequality in Indonesia over Half a Century? *Asian Development Review*, 38(1), 68–97. [https://doi.org/10.1162/adev\\_a\\_00158](https://doi.org/10.1162/adev_a_00158)
- Ikhsan, M., & Virananda, I. G. S. (2021). Fiscal Sustainability in Indonesia with Asymmetry. *Economics and Finance in Indonesia*, 67(1), 19. <https://doi.org/10.47291/efi.v67i1.731>
- Karim, A. A. (2015). *Ekonomi Makro Islami* (8 ed.). PT. RajaGrafindo Persada.
- Kasanah, R., & Ryandono, M. N. H. (2022). Role and Position of Public Debt in Islamic Fiscal Policy in Indonesia. *AFEBI Islamic Finance and Economic Review*, 6(1), 43–43. <https://doi.org/10.47312/aifer.v6i01.379>
- Kasumović, F. (2020). Rat Svete lige, gospodarska kriza i njezine posljedice: Köse Halil-paša i fiskalna transformacija u osmanskoj Bosni 1699. – 1702. *Povijesni prilozi*, 39(59), 203–227. <https://doi.org/10.22586/pp.v39i59.11343>
- Makhoba, B. P., & Kaseeram, I. (2022). Fiscal policy, sovereign debt and economic growth in SADC economies: A panel vector autoregression analysis. *Cogent Economics & Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2107149>
- MOLLENKAMP, D. T. (2024). *Social Justice Meaning and Main Principles Explained*. Investopedia. <https://www.investopedia.com/terms/s/social-justice.asp>



- Nasirin, W. K., Rukiah, R., Gautama, B., & Haruna, K. (2023). Long-Term And Short-Term Estimations On Indonesian Coal Exports. *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam*, 9(1), Article 1. <https://doi.org/10.24952/tijarah.v9i1.7718>
- Othman, A. (2021). *Towards a Sustainable Fiscal Position for Malaysia: A Proposal for Reform*. De Gruyter Oldenbourg. <https://doi.org/10.1515/9783110591187>
- Raies, A. (2020). Islamic versus Conventional Fiscal policy: The Effect of Zakat on Education and Employment. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, 9(1), 27. <https://doi.org/10.36941/ajis-2020-0003>
- Roser, M. (2023). The history of global economic inequality. *Our World in Data*. <https://ourworldindata.org/the-history-of-global-economic-inequality>
- Siddique, M. Z. (2020). Modern money and Islamic banking in the light of Islamic law of riba. *International Journal of Finance & Economics*, 27(1), 993–1008. <https://doi.org/10.1002/ijfe.2196>
- Tajbakhsh, K. (2021). The Political Economy of Fiscal Decentralization under the Islamic Republic of Iran. *The Muslim World*, 111(1), 113–137. <https://doi.org/10.1111/muwo.12375>
- Uphoff, E. P., Pickett, K. E., Cabieses, B., Small, N., & Wright, J. (2013). A systematic review of the relationships between social capital and socioeconomic inequalities in health: A contribution to understanding the psychosocial pathway of health inequalities. *International Journal for Equity in Health*, 12(1), 54. <https://doi.org/10.1186/1475-9276-12-54>
- Van Eck, N. J., & Waltman, L. (2017). Citation-based clustering of publications using CitNetExplorer and VOSviewer. *Scientometrics*, 111(2), 1053–1070. <https://doi.org/10.1007/s11192-017-2300-7>

